

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DI
PROVINSI JAWA TENGAHPADA TAHUN 2013-2017**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Nama : Destya Rachmawati

Nomor Mahasiswa : 15313024

Jurusan : Ilmu Ekonomi

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2019

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DI
PROVINSI JAWA TENGAH PADATAHUN 2013-2017**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar sarjana jenjang Strata 1

Program Studi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Destya Rachmawati

Nomor Mahasiswa : 15313024

Jurusan : Ilmu Ekonomi



PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang penjiplakan dari karya orang lain seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi iFakultas Ekonomi Universitas IslamIndonesia. Apabila dikemu dianhari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman / sanksi sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

Yogyakarta, 26 Februari 2019

Penulis,



Destya Rachmawati

PENGESAHAN

Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di
Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2013-2017

Nama : Destya Rachmawati
NIM : 15313024
Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 26 Februari 2019

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DIDERAH
GROBOGAN JAWA TENGAH PADA TAHUN 2013-2017**

Disusun Oleh : **DESTYA RACHMAWATI**

Nomor Mahasiswa : **15313024**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Jum'at, tanggal: 12 April 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : **Abdul Hakim, SE, M.Ec., Ph.D.**

Penguji : **Indah Susantun, Dra., M.Si.**

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

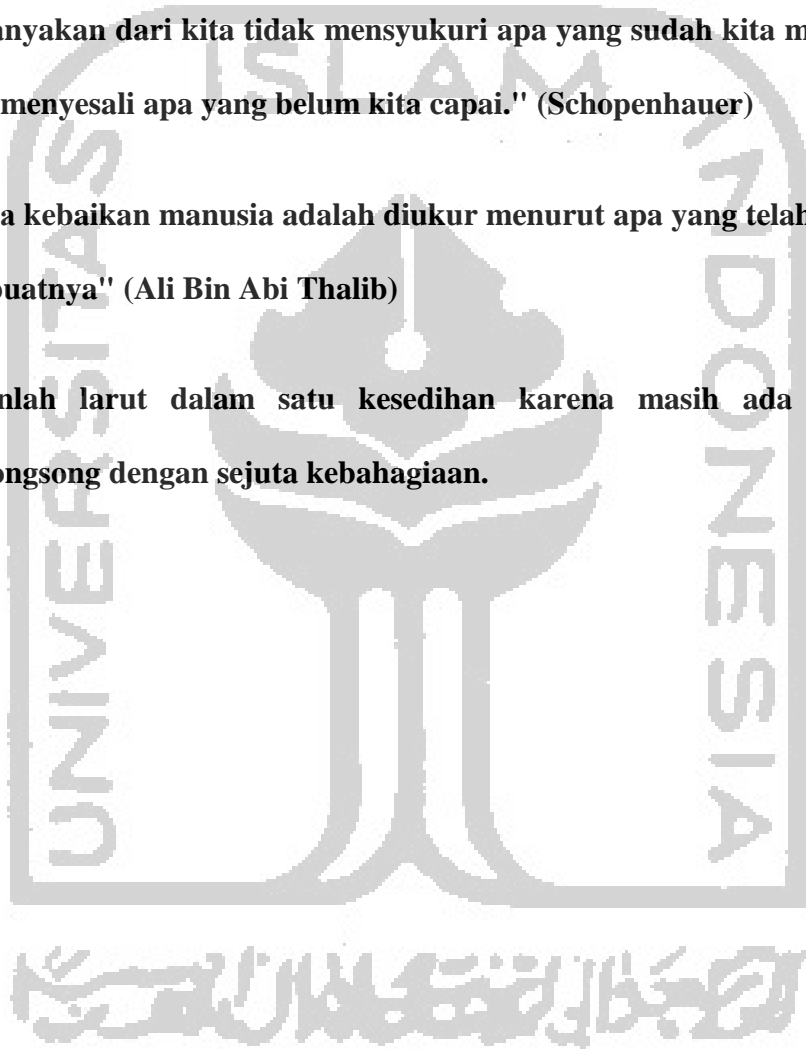
MOTTO

“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika halite memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak.” (Aldus Huxley)

"Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita selalu menyesali apa yang belum kita capai." (Schopenhauer)

“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan / diperbuatnya” (Ali Bin Abi Thalib)

Janganlah larut dalam satu kesedihan karena masih ada hari esok yang menyongsong dengan sejuta kebahagiaan.



Halaman Persembahan

Alhamdulillah wasyukurillah

Ya Allah, Ya Robbi...Sang maha kuasa pemilik alam semesta yang telah memberikan segala rahmat dan karunianya yang berlimpah kepada kami para umatmu, sehingga karya yang sederhana ini dapat terselesaikan dan kupersembahkan kepada :

Kedua orang tua tercinta Alm Bapak Abu Haer dan Ibu Sri Hastuti yang telah memberikan dukungan yang takhenti-hentinya, yang selalu mendoakan dari jauh untuk penulis, memberikan kasih sayang yang tak terhingga, memberikan nasehat yang membangun serta tak lupa mengingatkan agar terus melaksanakan perintah Allah SWT.

Untuk kakakku M. Syaeful Anwar, keluarga besar dan teman-teman yang telah memberikan semangat serta dukungannya disegala hal dan terimakasih untuk semuanya.



Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumWr.Wb

Puji syukur kahadirat Allah SWT atas segala karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik yang berjudul “**Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2013-2017**”. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Allah SWT dan kepadajunjungankita Nabi Muhammad SAW besertakeluarga dan para sahabat dan kepadakitaselakuumatnya.

Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik berkat dukungan, motivasi, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam penulisan penelitian ini penulis tidak dapat lupa pula mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT,atas rahmat dan hidayah-Nya serta kesehatan yang telah dilimpahkan-Nya kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
2. Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnyayang telah memberikan petunjuk kebenaran seluruh umat manusia yang senantiasa kita harapkan syafa'atnya didunia dan diakhirat.
3. Orangtua tercinta,Bapak Alm. Abu Haer terimakasih atas limpahan kasih sayang selama hidupnya dan yang selalu memberikan nasehat supaya rajin belajar. Ibunda Sri Hastuti yang selalu memberikan semangat,doa dan perhatiannya yang selalu dipanjatkan untuk penulis.

4. Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini,terimakasih telah membimbing dan memberikan arahan kepada peulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ilmu-ilmu yang bapak telah berikan kepada penulis selama menempuh jenjang Strata 1 juga dijadikan penulis sebagai bekal untuk kedepannya.
5. Bapak Dr. Sahabudin Sidiq., S.E.,M.A selaku Kepala Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Jaka Sriyana., S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
7. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan UII yang telah mewariskan ilmunya kepada pnulis.
8. Kakak tercinta Muhamad Syaeful Anwar yang selalu memberikan semangat,motivasi dan selalu mau direpotkan oleh adiknya.
9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Ekonomi FE UII terimakasih atas saran,pemikiran dan motivasi serta semangat dalam penyelesaian Skripsi ini.
10. Sahabat di Ilmu Ekonomi FE UII yang selalu memberikan semangat,motivasi dan selalu ada di saat membutuhkan bantuan.
11. Teman belajar yang selalu memberikan semangat dan mau membagi ilmunya.
12. Sahabat Safira Widayanti yang selalu memberikan semangat,motivasi dan selalu mau berbagi ilmu kepada penulis.
13. Kepada anak kost Putri Edelweis yang selalu memberikan semangat untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan, sehingga segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan pihak-pihak terkait lainnya.



Yogyakarta, Februari 2019

Destya Rachmawati

Daftar Isi

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	i
Pernyataan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Berita Acara Ujian Tugas Akhir / Skripsi	iv
Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Halaman Kata Pengantar	vii
Halaman Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xii
Abstrak	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II	7
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	7
2.1 Kajian Pustaka	7

2.2 Landasan Teori.....	9
2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	9
2.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU).....	14
2.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK).....	17
2.2.4 Inflasi.....	19
2.3 Kerangka pemikiran.....	25
2.4 Hipotesis.....	25
BAB III.....	26
METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi.....	26
3.2 Jenis dan Pengumpulan Data.....	26
3.3 Metode Analisis.....	27
3.3.1 Model Regresi Data Panel.....	27
3.3.2 Uji Statistik.....	30
BAB IV.....	32
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Deskripsi Data Penelitian.....	32
4.2 Hasil dan Pembahasan Analisis Data.....	32
4.2.1 Pemilihan Model Regresi.....	32
4.3 Pengujian Hipotesis.....	35
4.3.1 Koefisien Determinasi (R^2).....	35
4.3.2 Hasil Uji Parsial (Uji F).....	35
4.3.3 Hasil Uji Individu (Uji t).....	36
BAB V.....	38
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	38
5.1 Kesimpulan.....	38
5.2 Implikasi.....	38
Daftar Pustaka.....	39
Lampiran.....	43

Daftar Tabel

1.1 Pertumbuhan Ekonomi Sejava Tengah Pada Tahun 2013-2017.....	2
1.2 Pengeluaran Dalam PDRB Pada Tahun 2013-2017.....	2
1.3 Dana Alokasi Umum Pada Tahun 2013-2017.....	3
1.4 Dana Alokasi Khusus Pada Tahun 2013-2017.....	4
1.5 Inflasi.....	5
4.1 Hasil Uji Chow.....	33
4.2 Hasil Uji Hausman.....	34
4.3 Hasil Uji Fixed Effect.....	34
4.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	35
.....	35
4.5 Hasil Uji F.....	35
4.6 Hasil Uji t.....	36

Daftar Gambar

2.1 Gambar Permintaan dan Penawaran.....	22
2.2 Kerangka Pemikiran.....	25
3.1 Gambar Model Regresi.....	29

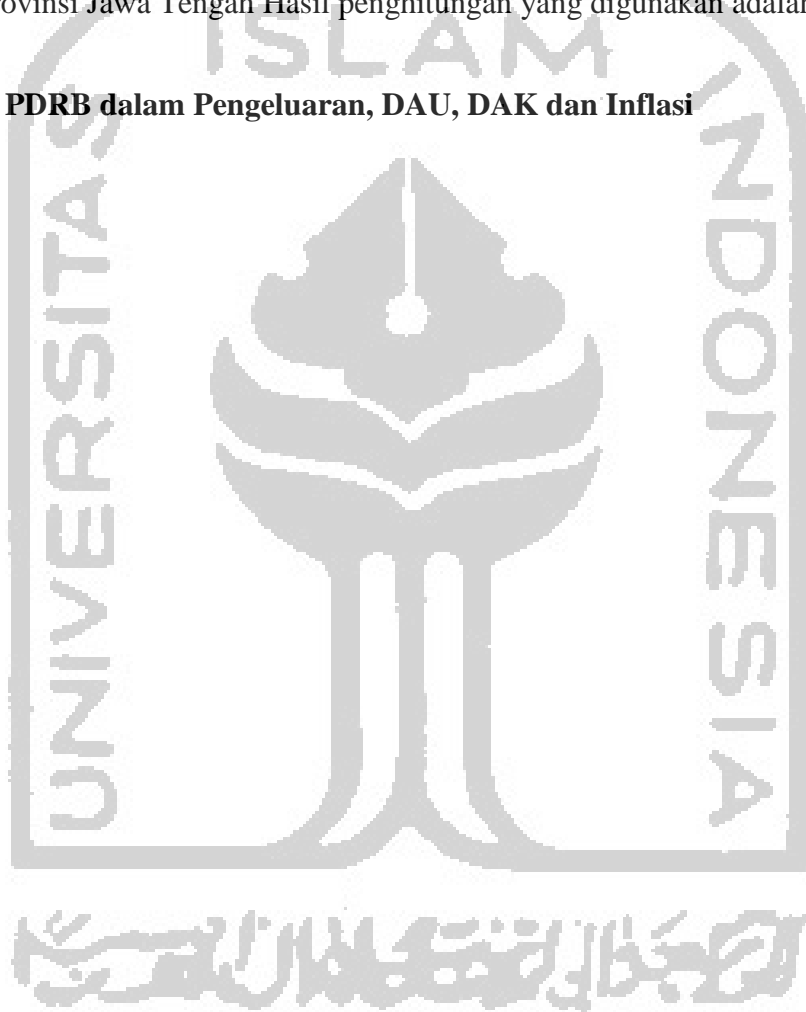
Daftar Lampiran

Lampiran I Data Penelitian.....	44
Lampiran II Hasil Fixed Effect.....	49
Lampiran III UJI CHOW.....	50

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data panel yang diambil dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah dan mengambil sampel data di Provinsi pada tahun 2013-2017. Data yang digunakan dalam data tersebut adalah Data PDRB dalam Pengeluaran, DAU, DAK dan Inflasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DAU dan Inflasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah sedangkan DAK tidak ada pengaruh dari pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Hasil penghitungan yang digunakan adalah hasil dari Fixed Effect.

Kata Kunci : PDRB dalam Pengeluaran, DAU, DAK dan Inflasi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara yang secara kesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat diartikan dengan kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang dapat diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan cara membandingkan antara ukuran nasional, *Gross Nasional Product* (GNP) pada tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya alam, faktor ilmu pengetahuan alam dan teknologi, faktor budaya serta faktor daya modal.

Pengeluaran Pemerintah adalah suatu kebijakan fiskal untuk mengatur suatu jalannya perekonomian dengan menentukan besarnya penerimaan ataupun pengeluaran pemerintah pada tiap tahunnya. Yang dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk wilayah nasional. Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk wilayah daerah ataupun regional. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk menstabilkan harga, tingkat output ataupun kesempatan kerja dan untuk mendorong suatu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah sangat tinggi dan dapat dilihat dari sisi Pengeluaran seperti meningkatnya konsumsi swasta, khususnya dalam konsumsi rumah tangga serta investasi. Berikut ini adalah Pertumbuhan Ekonomi Se Jawa Tengah pada tahun 2013-2017 :

Tabel 1.1 Dalam Bentuk Juta Rupiah

Tahun	PDRB
2013	12730236616
2014	16846898289
2015	17547686334
2016	22626201874
2017	235791000000

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang telah dialokasikan bertujuan untuk pemerataan dalam kemampuan keuangan dari daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam suatu pelaksanaan desentralisasi di dalam UU Nomer 33 Tahun 2004. Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan Pendapatan Asli Daerah. Dana Alokasi Umum yang mempunyai tujuan untuk pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Sehingga perbedaan antar daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat di perkecil (Indarti dan Sugiartiana, 2012). Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan telah di atur dalam UU 32/2004. Dana Alokasi Umum merupakan dana hibah (*grants*) yang kewenangan pengguna diserahkan penuh kepada Pemda penerima (Arwati dan Hadiati, 2013). Permasalahan dalam suatu Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan dengan cara pandang dari pemerintah pusat dan daerah. Bagipusat Dana Alokasi Umum dijadikan sebagai instrument *horizontal imbalance*. Bagi

daerah Dana Alokasi Umum yang dimaksud adalah untuk mendukung kecukupan pembiayaan daerah. Permasalahan timbul ketika daerah meminta Dana Alokasi Umum yang besar atau sesuai dengan kebutuhan pembiayaan daerah.

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai suatu kegiatan khusus berupa urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus ditetapkan setiap tahun dalam rancangan suatu APBN. Dasar hukum yang berlaku pada Dana Alokasi Khusus yaitu di dalam Undang-Undang No.33 pada Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No.55 pada Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomer 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Keuangan ke Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomer 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah.

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus sedangkan pada tingkat inflasi menunjukkan tingkat presentase perubahan tingkat harga rata-rata tertimbang untuk barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara. Tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada di pasaran mempunyai jumlah dan jenis yang sangat beragam, dalam sebagian besar dari harga-harga barang tersebut yang selalu meningkatkan dan mengakibatkan terjadinya inflasi. Inflasi murni adalah inflasi yang terjadi sebelum adanya campur tangan dari pihak pemerintah. Yang berupa kebijakan fiscal maupun kebijakan moneter. Dalam suatu laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode keperiode ataupun dari tahun ketahun.

Penulis ingin mengetahui Pertumbuhan Ekonomi Dalam Sektor Pengeluaran di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas mengenai **“Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa**

Tengah Pada Tahun 2013-2017”. Berdasarkan hal tersebut di atas cukup menarik untuk di teliti maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian. DAU, DAK dan Inflasi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. Peneliti ingin mengetahui kondisi perekonomian pada Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2013-2017.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017?
2. Bagaimana pengaruh DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017?
3. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengeluaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis DAU, DAK dan Inflasi pada pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.
3. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dalam penelitian ini dapat mengetahui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.
2. Dalam penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terhadap para peneliti selanjutnya dan dapat membandingkan penelitian yang akan dilakukan antara penelitian dimasa lalu dengan masa yang akan datang sehingga bisa memberikan perubahan yang kearah lebih baik lagi.

3. Dengan adanya penelitian ini Pemerintah bisa memberikan pengaruh dalam berbagai masukan dalam penentuan suatu kebijakan yang akan ditetapkan oleh Pemerintah seperti upaya peningkatan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan mafaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Di dalam bab ini akan membahas tentang unsur-unsur penelitian yang memuat penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Bab ini juga berisi teori-teori yang mendasari dilakukannya penelitian variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan hipotesis mengenai penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

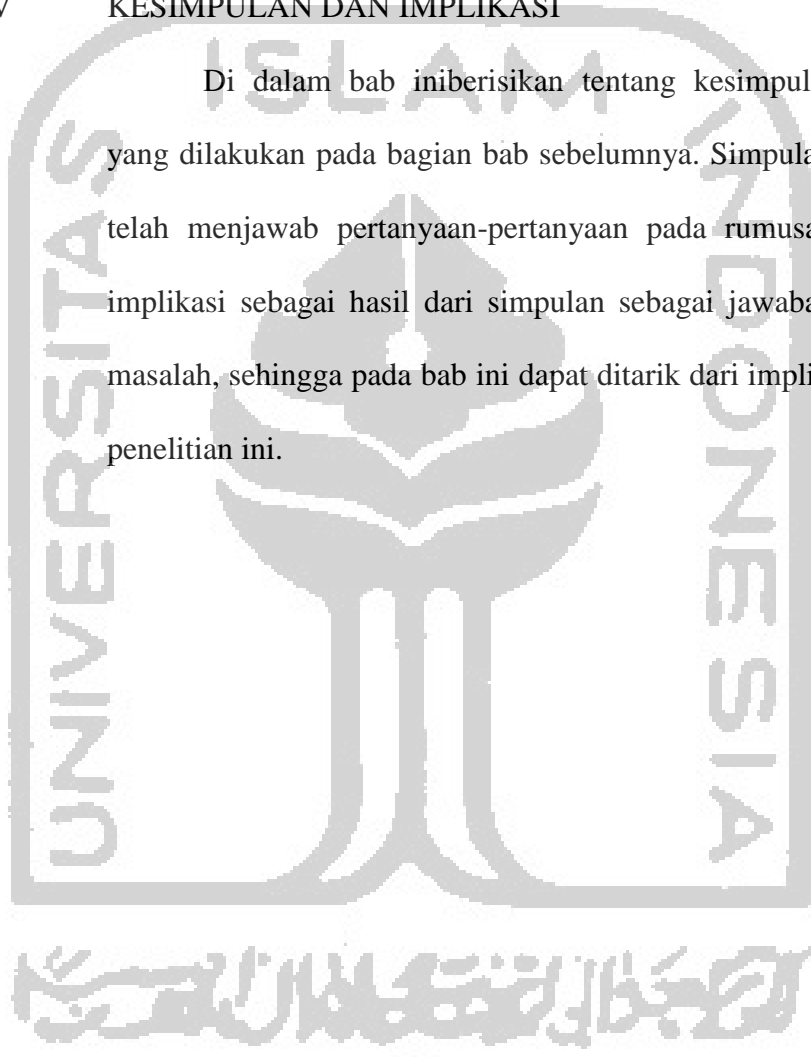
Di dalam bab ini akan membahas tentang jenis dan sumber data ,menjelaskan tentang variabel-variabel yang akan digunakan agar bisa mengoperasionalkan di dalam penelitian dan membahas tentang metode analisis yang di gunakan dalam peletian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini akan membahas tentang data penelitian, menyajikan hasil penelitian, analisis data dan pembahasandarianalisis data. Bab ini juga membahas semua temuan-temuan dari hasil penelitian analisis.

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Di dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari analisis yang dilakukan pada bagian bab sebelumnya. Simpulan ini juga harus telah menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah dan implikasi sebagai hasil dari simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, sehingga pada bab ini dapat ditarik dari implikasi teoritis dari penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Wibowo (2012), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 1984 – 2009”. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan alat analisis regresi linier dengan metode *Ordinary Least square (OLS)*. Menyatakan hasil penelitian bahwa variable jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan PDRB Kabupaten Grobogan pada derajat kepercayaan 95% serta variable pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan PDRB Kabupaten Grobogan pada derajat kepercayaan 95%.

Wasingah(2018), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015”. Metode analisis yang dapat digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan analisis data panel. Mengatakan bahwa hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, variable kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, variable inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, dan variable jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi kelima variable berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 99.92% sementara untuk sisanya yaitu 0.08% dijelaskan oleh variable lainnya.

Luh Putu Rani Mayasari Ni Kadek Sinarwati(2012), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng”.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan alat analisis Regresi Linier. Untuk memberikan bukti empiris dan mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Alokasi Belanja Modal dengan mempertimbangkan data yang dikumpulkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari tahun 2011-2013 berupa Laporan Realisasi Anggaran dengan sumber Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Buleleng. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat Pengaruh yang signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Setiyawati (2013), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran : Pendekatan Analisis Jalur”. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan alat analisis Regresi Linier. Pengaruh daerah asli pendapatan, DAU, DAK dan belanja modal pada pertumbuhan ekonomi; untuk memeriksa secara langsung pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran; dan untuk memeriksa secara tidak langsung efek pendapatan asli daerah, alokasi dana umum, alokasi dana khusus, dan belanja modal untuk kemiskinan dan pengangguran. Dalam penelitian yaitu biaya daerah dan anggaran pendapatan daerah pada tahun 2001 - 2005 di tiga puluh delapan kota. Hasil dari penelitian dengan regresi di indikasikan bahwa Pendapatan asli daerah dan alokasi general fund memiliki efek langsung yang signifikan pada tingkat 0,01 pada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi memiliki efek signifikan secara langsung pada tingkat 0,01 pada kemiskinan, dan pengangguran, pendapatan asli daerah dan alokasi dana umum secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan pengangguran.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses untuk meningkatkan pendapatan tanpa mengkaitkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk yang pada umumnya sering dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan bertambah pada suatu pendapatan nasional dalam periode tertentu, misalnya pada satu tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dari kapasitas produksi maupun pada jasa dalam kurung waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu faktor sumber daya manusia, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor sumber daya alam, faktor budaya dan faktor sumber daya modal.

Masalah yang di hadapi oleh pemerintah sangatlah besar karena harus menangani masalah kemiskinan yang ada di Indonesia terutama pada daerah-daerah yang terpencil dan bisa menyebabkan kemiskinan yang relative tinggi. Dan seharusnya pemerintah harus bisa mengambil kebijakan yang tegas untuk bisa menangani masalah kemiskinan. Pada tingkat kemiskinan yang tinggi akan terjadi rendahnya pendapatan perkapita, pendapatan perkapita yang rendah karena terjadinya estasis per kapita juga akan mengakibatkan penurunan atau rendah. Negara sangatlah berpengaruh terhadap suatu syarat utama dalam penurunan kemiskinan yang tetap pada suatu pertumbuhan ekonomi. Pengangguran yang semakin meningkat maka akan membuat kemiskinan yang meningkat sedangkan apabila upah riil semakin meningkat maka akan menurunkan jumlah kemiskinan. Oleh sebab itu peran pemerintah sangatlah penting untuk meningkatkan upah riil yang di butuhkan, sehingga masalah kemiskinan bisa teratasi masalahnya pada setiap tahunnya.

Todaro (2000), tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi

penduduk ataupun masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi hidupnya. Dalam tolak ukur keberhasilan pembangunan dilihat dari struktur ekonomi dan semakin kecil ketimpangan pendapatan antar penduduk, pertumbuhan ekonomi, antar daerah dan antar sektor. Pembangunan dalam lingkup negara secara tidak selalu merata. Kesenjangan antar daerah sering menjadi suatu permasalahan serius. Di beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara di beberapa daerah pertumbuhannya mengalami keterlambatan.

Daerah yang tidak mengalami kemajuan yang sama karena sumber yang telah dimiliki sangat berbeda, kecenderungan peranan modal (*investor*) memilih perkotaan atau daerah yang memiliki sarana atau fasilitas yang memiliki hubungan dengan adanya aliran listrik, aliran telekomunikasi, perbankan, asuransi dan tenaga kerja yang terampil serta adanya ketimpangan dalam suatu distribusi, pembagian pendapatan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah. Adapun perbedaan pada tingkat pembangunan akan membawa dampak pada tingkat kesejahteraan antar daerah bisa menyebabkan ketimpangan antar daerah yang semakin besar. Suatu negara mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan suatu pembangunan ekonomi, indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi maka negara tersebut bisa melakukan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara kesinambungan menuju keadaan yang lebih baik pada saat periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang dapat diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional dan indikasi keberhasilan dalam pembangunan ekonomi untuk kehidupan masyarakat. Hal ini karena negara berkembang termasuk Indonesia menghadapi dua masalah yang besar, yaitu pada kesenjangan ekonomi atau ketimpangan.

Prayitno, 1986 dalam Damarjati (2010), masalah yang sering dihadapi oleh negara berkembang yang mempunyai suatu masalah dalam menentukan strategi dasar pembangunan

yaitu pada pertumbuhan ekonomi atau pemerataan pendapatan. Ada pendapat dari pakar ekonomi tentang pendapatnya tentang adanya laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi makasud tidak dapat dipakai untuk mengurangi kemiskinan, sementara kemiskinan adalah realita dalam kehidupan ekonomi pada negara yang sedang berkembang. Berbanding terbalik pada negara yang berkembang pada negara yang maju sangat bisa untuk meningkatkan pendapatan merupakan tujuan penting dari suatu segala kegiatan ekonomi. Pada saat tingginya ekonomi di suatu daerah tidak menjamin pemerataan pendapatan, namun pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat tetap dianggap suatu strategi yang unggul dalam suatu pembangunan ekonomi.

Arsyad (2010), dalam proses pembangunan ekonomi pada suatu daerah akan mengalami pertumbuhan dan perubahan struktural ekonomi. Pada karakteristik suatu kondisi daerah yang sangat beragam dan berbeda-bedaan suatu wilayah atau daerah yang mengalami pembangunan ekonomi yang berbeda. Dalam suatu pelaksanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi dari berbagai kebijakan, suatu program untuk meningkatkan otonomi daerah yang luas pada daerah. Dalam suatu kebijakan otonomi daerah akan memberikan kesempatan besar pada daerah untuk merumuskan dan memberikan tujuan dari pembangunan daerah untuk menjaga makna keberadaan dalam sebuah system pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam pembangunan pada daerah mempunyai tujuan yang paling penting untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuannya yaitu pemerintah daerah dan masyarakat harus selalu bersama untuk mengambil dampak positif dalam pembangunan daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah harus mempunyai potensi pada setiap sumber daya yang akan diperlukan untuk suatu perencanaan dalam membangun perekonomian di daerah.

Salah satu masalah yang sering dihadapi adalah rendahnya daya saing sumber daya manusianya. Pada suatu perkembangan ekonomi selalu mengacu pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah pertumbuhan *output* daerah yang mempunyai fungsi dari faktor produksi dan fungsi produksi. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi, maka akan mendistribusikan pendapatan rumah tangga dalam suatu faktor produksi mengalami perbaikan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah faktor produksi yang turut serta menciptakan pendapatan daerah tersebut. Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula produktivitas factor produksi dan semakin tinggi pula upah yang akan diterima oleh pekerja. Menurut Sukirno (1996), pertumbuhan dan pengembangan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Maka dengan demikian semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dan semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dikatakan dengan berhasil jika menggunakan ukuran dari beberapa indikator yang lazim yang digunakan sebagai salah satu alat ukur. Indikator yang lazim yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bisa menjadi petunjuk kinerja perekonomian secara umum yang dapat dilihat sebagai ukuran kemajuan untuk suatu daerah.

Pada proses pembangunan terjadi dilemma yaitu antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi pendapatan, masalah yang harus dihadapi oleh negara miskin dan berkembang. *Trade off* atau pertukaran antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan pada masing-masing daerah selalu terjadi. Kuznet telah mengemukakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, dengan kata lain ketimpangan yang tinggi, namun pada tahap berikutnya hal tersebut akan membaik. Menurut Kuznet, pada distribusi pendapatan akan meningkat jika sejalan dengan pertumbuhan

ekonomi (Todaro,2003). Dengan adanya penelitian menurut Sutarno dan Kuncoro (2003) mengatakan tentang hipotesis Kuznets mengenai ketimpangan yang berbentuk kurva U terbalik belaku pada suatu daerah tertentu. Sedangkan menurut Imani (2013) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan angka partisipasi kasar mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk membangun perkembangan dan kemajuan perekonomian di suatu daerah, wilayah dan negara. Karena saling berhungan satu sama lain dengan keaktifitasan kegiatan ekonomi di masyarakat. Dalam hal tersebut untuk meningkatkan tingkat produksi atau jasa, yang mampu memberikan *trickledown effect* yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi yang meningkat bisa menjadi target untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi di tingkat daerah dan nasional. Dalam pertumbuhan ekonomi pada tingkat daerah digunakan Produk Domestik Regional Bruto rill sedangkan pada tingkat nasioanal digunakan Produk Domestik Bruto rill.

Kegiatan pembangunan yang diarahkan kepembangunan daerah khususnya daerah yang relatif mempunyai tingkat kemiskinan yang terus naik dari tahun ketahun. Pembangunan daerah memiliki kesinambungan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah di tetapkan untuk pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Oleh sebab itu indicator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah penurunan jumlah penduduk miskin. Efektifitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin yaitu mempunyai strategi pembangunan. Kriteria dalam pemilihan sector mempunyai titik berat atau sektor pembangunan ekonomi nasional adalah efektifitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu ukuran dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan khusus didalam bidang ekonomi. Pertumbuhan merupakan gabungan laju

pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor ekonomi yang menggambarkan tingkat perkembangan ekonomi yang telah terjadi. Dalam melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ketahunnya. Yang disajikan melalui PDRB dengan harga konstan menurut lapangan usaha secara berkala atau bertahap. Pertumbuhan ekonomi yang positif sangat menunjukkan adanya peningkatan dalam perekonomian maka dengan sebaliknya apabila pertumbuhan ekonomi negatif maka menunjukkan dalam sebuah penurunan. Pada tahun 2001-2012 dengan nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan sebesar 4,52 persen pertahunnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 6,16 persen setelah tahun 2011 akan memperlambat pertumbuhan sebesar 3,59 persen sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2003 sebesar 2,20 persen.

2.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Pusat kesetiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang ada di Indonesia pada tiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU adalah suatu komponen belanja pada APBN dan telah menjadi komponen pendapatan pada APBD. Dana Alokasi Umum dapat dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Dari jumlah keseluruhan DAU yang telah ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto dan telah ditetapkan didalam APBN. Dana Alokasi Umum memiliki sifat *Block Grant* yang artinya penggunaan dapat diserahkan kepada daerah yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Di dalam dasar hukum Dana Alokasi Umum yaitu UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan PP No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dalam alokasi Dana Alokasi Umum yaitu Dana Alokasi Umum dapat dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota dan

proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Kebutuhan fiskal dalam Dana Alokasi Umum dapat mengukur dengan menggunakan variabel dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia sedangkan kapasitas fiskal dapat diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil. Alokasi dapat dihitung dengan berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Data yang digunakan dalam penghitungan Dana Alokasi Umum diperoleh dari Lembaga Statistik Pemerintah atau Lembaga Pemerintah yang berwenang dalam menerbitkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam suatu data yang dimaksud tidak tersedia, maka data tersebut dapat digunakan adalah data dasar penghitungan Dana Alokasi Umum pada tahun sebelumnya. Kapasitas fiskal daerah merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan DBH. Kondisi penerimaan Dana Alokasi Umum berdasarkan nilai celah fiskal :

- a. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari nol, maka akan menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar yang telah ditambah celah fiskal.
- b. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol, maka akan menerima Dana Alokasi Umum yang memiliki besar adalah alokasi dasar.
- c. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut akan lebih kecil dari alokasi dasar, maka akan menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar yang telah diperhitungkan dengan nilai celah fiskal.
- d. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, maka tidak akan menerima Dana Alokasi Umum.

Formulasi Dana Alokasi Umum di bagi menjadi 3 yaitu :

1. Formula Dana Alokasi Umum merupakan pendekatan pada celah fiskal (*fiscal gap*) yang memiliki selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) akan mengurangi kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan Alokasi Dasar yang berupa jumlah gaji PNS di daerah.

Rumus :

$$DAU = AD + CF$$

Keterangan :

AD = Gaji PNS Daerah

CF = Kebutuhan Fiskal-Kapasitas Fiskal

2. Variabel Dana Alokasi Umum merupakan komponen variabel dalam kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) yang dapat digunakan untuk pendekatan dalam perhitungan kebutuhan daerah terdiri dari : jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Produk Domestik Regional Bruto per kapita. Dalam komponen variabel kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.
3. Metode Perhitungan Dana Alokasi Umum dibagi menjadi dua yaitu :
 - a. Alokasi Dasar yaitu Besaran Alokasi Dasar yang dihitung berdasarkan realisasi gaji PNS Daerah pada tahun sebelumnya ($t-1$) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat yang telah sesuai dalam peraturan pengajian PNS yang telah berlaku.
 - b. Celah Fiskal yaitu suatu alokasi berdasar dengan celah fiskal pada suatu daerah yang dapat dihitung dengan mengalikan bobot celah fiskal pada daerah yang

bersangkutan (CF daerah dibagi dengan total CF nasional) dengan alokasi Dana Alokasi Umum CF nasional. CF pada suatu daerah dapat dihitung berdasarkan selisih antara K_BF dengan K_PF.

2.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai suatu kegiatan khusus berupa urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus ditetapkan setiap tahun dalam rancangan suatu APBN. Dasar hukum yang berlaku pada Dana Alokasi Khusus yaitu Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomer 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Keuangan ke Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomer 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah.

Perhitungan Dana Alokasi Khusus ada dua tahapan yaitu penentuan daerah tertentu yang dapat menerima Dana Alokasi Khusus dan penentuan besaran alokasi Dana Alokasi Khusus dalam masing-masing daerah. Dalam suatu penentuan pada daerah tertentu yang akan menerima Dana Alokasi Khusus harus memiliki kriteria umum, khusus dan teknis. Dalam mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Khusus memiliki kriteria yaitu :

- a. Kriteria Umum, dapat dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang di cerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Keuangan daerah dapat dihitung melalui indeks fiskal netto. Daerah yang memenuhi kriteria umum di daerah tertentu yang telah ditetapkan setiap tahunnya.
- b. Kriteria Khusus, dapat dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Melalui indeks

kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri atau pimpinan lembaga yang terkait.

c. Kreteria Teknis,dapat disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Melalui indeks teknis oleh menteri yang terkait dan yang dimaksud adalah kepada Menteri Keuangan. Arah kegiatan Dana Alokasi Khusus yaitu:

- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Pendidikan
- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Kesehatan
- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Infrastruktur Jalan
- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Infrastruktur Irigasi
- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Infrastruktur Air Minum
- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Infrastruktur Sanitasi
- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Prasarana Pemerintahan Desa
- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan
- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Kelautan dan Perikanan
- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Pertanian
- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Keluarga Berencana
- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Kehutanan
- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal
- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Sarana Perdagangan
- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Energi Perdesaan
- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Perumahan dan Permukiman
- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Keselamatan Transportasi Darat

Dalam dana pendamping di daerah penerima Dana Alokasi Khusus wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari nilai Dana Alokasi

Khusus yang akan diterima untuk mendanai kegiatan fisik. Dalam dana tersebut wajib dianggarkan dalam APBD di tahun anggaran berjalan. Optimalisasi dan sisa Dana Alokasi Khusus di bagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Daerah yang telah menerima Dana Alokasi Khusus dapat melakukan suatu penggunaan Dana Alokasi Khusus dengan perencanaan dan menyelenggarakan kembali suatu kegiatan Dana Alokasi Khusus dalam APBD, pada saat optimalisasi dilakukan dengan kegiatan di bidang Dana Alokasi Khusus yang sama yang telah sesuai dengan petunjuk teknis.
2. Dalam mendapatkan sisa Dana Alokasi Khusus pada kas daerah saat tahun anggaran sudah berakhir maka daerah tersebut dapat menggunakan sisa Dana Alokasi Khusus tersebut untuk mendanai kegiatan Dana Alokasi Khusus di bidang yang sama pada tahun anggaran yang berikutnya.

2.2.4 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan yang meningkatkan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Gejala pada umumnya yang ditimbulkan oleh kenaikan jumlah uang beredar maka akan menyebabkan adanya kenaikan harga. Dalam laju inflasi pada umumnya dapat dinyatakan kedalam angka persentase. Laju inflasi sendiri dapat terjadi pada tingkat yang ringan, sedang, berat dan hiperinflasi.

Kebijakan dalam pembangunan berdasarkan kepada keyakinan bahwa inflasi akan menimbulkan berbagai akibat yang buruk terhadap masyarakat tetapi dapat menghambat laju pembangunan. Pada abad 1980-an ada beberapa negara yang tidak berusaha menghindari masalah inflasi dalam membangun perekonomian. Kebijakan ini didasarkan pada keyakinan bahwa inflasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dielakan dalam proses pembangunan. Pembangunan ekonomi yang telah berlangsung di negara maju maupun negara berkembang tidak memberikan gambaran yang seragam mengenai kaitan antara inflasi dan pembangunan

ekonomi. Di beberapa negara inflasi yang relatif cepat diikuti dengan pertumbuhan yang lambat. Sedangkan di beberapa negara lain pembangunan ekonomi yang cepat terjadi di dalam masa inflasi. Juga, pembangunan ekonomi di beberapa negara menunjukkan bahwa adakalanya perkembangan ekonomi yang cepat diikuti oleh inflasi dan adakalanya oleh kestabilan harga-harga. Sebaliknya, dalam masa perkembangan yang lambat, ada negara yang mengalami inflasi dan ada pula negara yang tidak mengalami inflasi. Inflasi merupakan suatu kenaikan pada harga sejumlah barang dan jasa hanya harga dari satu jenis barang atau jasa. Inflasi menyangkut harga sejumlah barang dan jasa, dalam perhitungannya inflasi tidak sesederhana menghitung kenaikan satu jenis barang atau jasa. Dalam perekonomian yang cukup berkembang dan barang serta jasa yang dikonsumsi masyarakat sangat bermacam-macam, maka perhitungan inflasi sangatlah kompleks. Mengingat laju inflasi harus mencerminkan perubahan harga dari sejumlah barang dan jasa. Pada umumnya laju inflasi dapat dihitung dengan menggunakan angka yang indeks. Laju inflasi dapat dihitung dengan cara yang berbeda-beda. Laju inflasi pada umumnya dan secara luas di masyarakat adalah laju inflasi dalam menghitung perubahan harga barang dan jasa yang telah dikonsumsi di masyarakat dan sebagai Indeks Harga Konsumen (IHK).

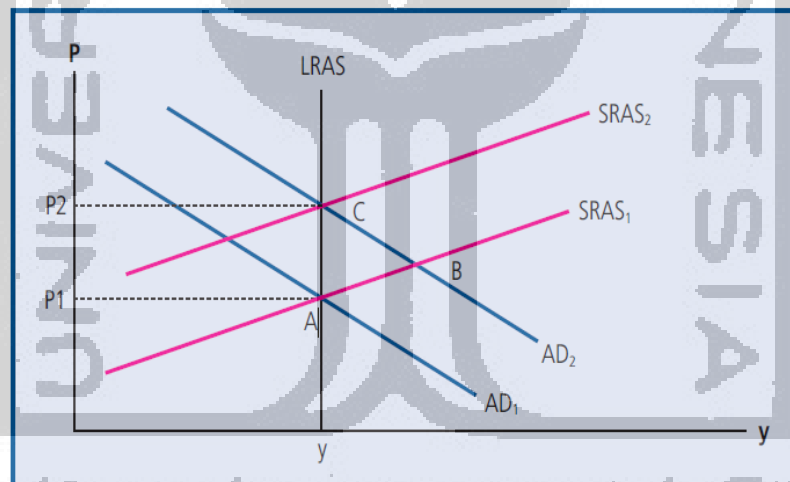
Dalam menghitung angka laju inflasi dapat diperhitungkan dengan adanya angka indeks menggunakan sejumlah barang dan jasa yang dapat diperhitungkan. Angka indeks berbeda dengan satu negara ke negara yang lainnya dan dari waktu ke waktu dalam suatu negara tertentu yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi konsumen atau masyarakat yang bersangkutan. Yang dapat menghitung selain IHK, inflasi dapat dihitung berdasarkan Indeks Biaya Hidup (IBH), Indeks Harga Produsen (IBP), Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) atau dengan cara menghitung dengan deflator Produk Domestik Bruto (PDB deflator). Dari berbagai jenis angka indeks yang akan digunakan dalam suatu perhitungan dengan besarnya berbagai jenis laju inflasi disebut dengan perhitungan angka IHK. Dalam

suatu perhitungan inflasi akan memiliki tujuan yang berbeda. Dalam inflasi dengan menggunakan teori kuantitas maka tidak hanya menyatakan bahwa jumlah uang yang beredar sebagai penyebab perubahan tingkat harga. Teori ini juga berkaitan dengan proporsionalitas jumlah uang dengan tingkat harga, mekanisme transmisi moneter, netralitas uang dan teori moneter tentang tingkat harga. Ahli ekonomi yang beraliran monetaris adalah ekonom Milton Friedman yang mendapatkan penghargaan Nobel pada bidang ekonomi pada tahun 1976. Pada teori permintaan uang menyatakan bahwa permintaan uang di masyarakat dapat ditentukan dengan jumlah variabel ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, suku bunga dan tingkat harga. Dalam teori permintaan uang, tingkat harga atau laju inflasi akan berubah apabila jumlah uang yang beredar tidak sesuai dengan jumlah yang diminta atau yang diperlukan oleh suatu perekonomian. Dan apabila jumlah uang yang beredar lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang diminta atau dibutuhkan oleh masyarakat, maka tingkat harga akan meningkat dan bisa menyebabkan inflasi. Sedangkan jumlah uang yang beredar lebih kecil dengan jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat maka tingkat harga akan turun dan akan menyebabkan deflasi.

Dalam teori Keynes mengatakan bahwa teori kuantitas yang telah diasumsikan elastisitas dan perputaran uang (*velocity of circulation*) adalah tetap atau tidak benar. Elastisitas dan perputaran uang sangat sulit di prediksi dan mempengaruhi suatu ekspektasi masyarakat serta perubahan barang yang merupakan substitusi uang (*financial assets*). Hal ini dapat di buktikan dengan adanya suatu perekonomian yang sektor keuangannya telah melaju dan terdapat instrumen keuangan yang berfungsi sebagai substitusi uang, maka perputaran uang akan menjadi lebih sulit diprediksi. Pendapat menurut aliran keynesian tentang inflasi adalah suatu gejala moneter dalam berbagai kajian yang di pelapori oleh Friedman (1963) dan dalam waktu jangka panjang memiliki keterkaitan yang erat antara inflasi dan jumlah uang yang beredar. Yang mempengaruhi faktor inflasi yaitu dari sisi permintaan, sisi

penawaran maupun ekspektasi. Dalam inflasi permintaan mempunyai dua variabel yaitu permintaan agregat dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah jumlah keseluruhan pada kebutuhan konsumsi dan investasi kedalam suatu perekonomian sedangkan penawaran agregat adalah seluruh potensi yang telah dimiliki oleh perekonomian yang menghasilkan barang dan jasa bersangkutan. Penggunaan permintaan dan penawaran agregat dapat digambarkan yang terjadinya kenaikan tingkat harga umum disebut dengan inflasi. Digrafik 1 perekonomian dalam tingkat keseimbangan waktu jangka panjang yang digambarkan pada titik Y^* merupakan kurva permintaan agregat (AD_1) berpotongan dengan kurva penawaran agregat (penawaran dalam waktu jangka pendek ($SRAS_1$) maupun penawaran waktu jangka panjang ($LRAS$)) pada titik A.

Gambar 2.1 Permintaan dan Penawaran



Sumber : Bank Indonesia, 2009

Dalam waktu jangka panjang penawaran agregat dianggap tetap karena seluruh kapasitas produksi telah digunakan. Pada titik tersebut tingkat harga terjadi pada tingkat P_1 . Apabila jumlah uang yang beredar bertambah maka jumlah permintaan agregat akan bertambah sehingga kurva permintaan agregat akan bergeser kekanan dan menjadi AD_2 . Dalam waktu jangka pendek perekonomian akan bergeser pada titik B akan tetapi pada titik

tersebut perekonomian telah melampaui kapasitas yang tersedia. Maka kurva penawaran agregat akan bergeser ke kiri menjadi SRAS₂ sampai pada keseimbangan semula dan akan berhenti pada titik C. Keseimbangan baru di tingkat harga akan meningkat dan tercapai di titik P₂. Apabila pada pertambahan uang beredar terus berlanjut maka akan terjadi kenaikan harga di titik P₃, P₄ dan seterusnya, dan *output* tidak akan bertambah besar. Dalam kondisi ini bahwa inflasi akan terjadi sehingga pertambahan jumlah uang yang beredar. Dalam inflasi penawaran menyebabkan inflasi yang sering ditimbulkan sebagai *cost push* atau *supply shock inflation*. Di karenakan inflasi ini disebabkan oleh kenaikan biaya suatu produksi atau biaya pengadaan barang dan jasa. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan harga penawaran atas suatu barang termasuk barang impor serta harga barang yang dikendalikan oleh Pemerintah. Interaksi antara penawaran dan agregat merupakan suatu jumlah permintaan agregat yang telah melebihi suatu penawaran agregat maka harga-harga akan meningkat. Dapat digambarkan persamaan sebagai berikut : $P = D/S$. Apabila P adalah harga sedangkan D dan S adalah permintaan dan penawaran agregat. Maka P akan naik selama jumlah D lebih besar dibandingkan dengan jumlah S. Hal ini bisa terjadi apabila D yang meningkat sedangkan S tetap atau kenaikan S tidak sebanding dengan kenaikan D. Hal serupa bisa terjadi apabila S berkurang sedangkan D tetap atau penurunan D tidak akan sebanding dengan penurunan S. Dalam sisi permintaan dan penawaran memiliki kesamaan dalam sebuah kenaikan tingkat harga *output* akan tetapi hal ini mempunyai dampak yang sangat berbeda terhadap *volume output* (PDB riil).

Dalam inflasi ekspektasi di dalam penawaran dan penerimaan memiliki ekspektasi dari para pelaku ekonomi atau sering disebut dengan inflasi ekspektasi (Gordon, 2007). Inflasi ekspektasi ini sangat berperan penting dalam suatu pembentukan harga dan upah tenaga kerja. Inflasi ekspektasi memiliki sifat adaptif (*backward expectation*) dapat mempengaruhi dalam berbagai hal yaitu inflasi permintaan yang persisten di masa lalu, inflasi penawaran

yang besar atau sering terjadi dan inflasi penawaran yang diperkuat oleh kebijakan moneter yang akomodatif. Untuk mengurangi dampak ekspektasi inflasi adaptif perlu adanya peningkatan kebijakan dari bank sentral. Bank sentral dapat menurunkan ekspektasi inflasi berdasarkan dalam kondisi ekonomi di masa yang akan datang (*forward looking*). Inflasi ini berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*) dan luar negeri (*imported inflation*). Dampak inflasi akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa maka nilai suatu mata uang akan mengalami penurunan dan daya beli mata uang akan semakin lemah. Penurunan daya beli berdampak terhadap individu, dunia usaha, serta anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Inflasi yang tidak menentu dan tak terkendali disebut dengan hiperinflasi adalah suatu keadaan dalam laju inflasi dapat meningkatkan ratusan atau ribuan persen dari waktu tertentu, hal ini sangat berbahaya bagi suatu perekonomian. Dalam khusus hiperinflasi dimasyarakat atau individu akan melakukan pembelanjaan uangnya sampai habis atau menukarkan dengan mata uang yang lebih stabil sebelum harganya akan meningkat. Inflasi adalah tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam periode bulanan, kuartal dan tahunan. Pada tingkat inflasi dapat dihitung dengan IHK yang dapat membandingkan IHK pada tahun dasar dengan IHK periode pengamatan. IHK dapat di hitung dengan rumus sebagai berikut :

$$I_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} \cdot Q_{0,i}}{\sum_{i=1}^k P_{0,i} \cdot Q_{0,i}} \times 100$$

Dimana :

I_n = Indeks periode ke-n

P_{ni} = Harga barang ke-i pada periode ke-n

$P_{(n-1)i}$ = Harga jenis barang ke-i pada periode ke-(n-1)

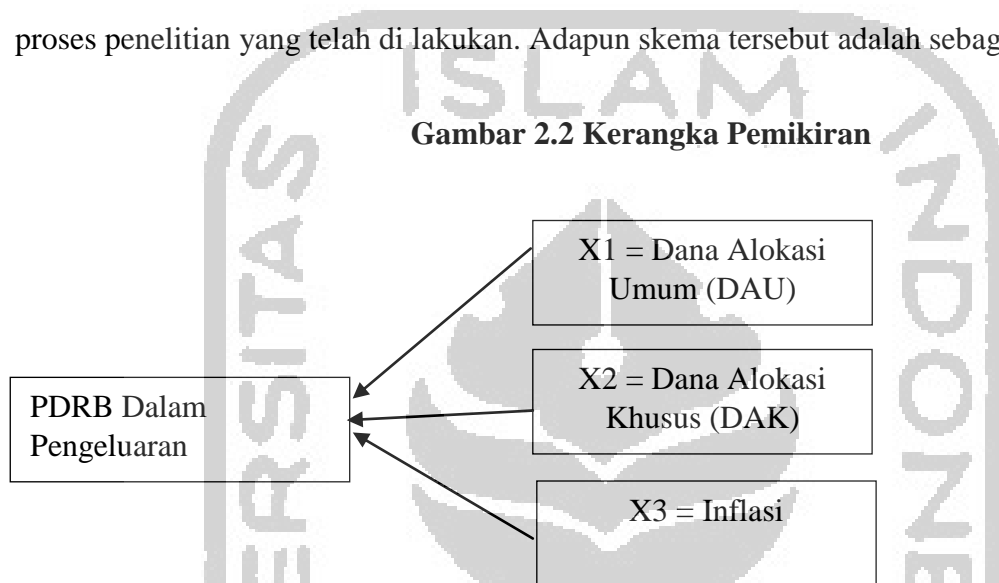
$P_{n,i} Q_i$ = Nilai konsumsi jenis barang ke-i pada periode ke-n

$P_{(n-1)i} Q_i$ = Nilai konsumsi jenis barang ke-i pada periode ke-(n-1)

K = Jumlah jenis barang paket komoditi

2.3 Kerangka pemikiran

Dalam suatu kerangka pemikiran merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang berisikan tentang grand theory dari seluruh bagian dasar teori dalam penelitian ini, dimana dalam kerangka penelitian ini dapat digambarkan dengan skema singkat yang mengenai proses penelitian yang telah dilakukan. Adapun skema tersebut adalah sebagai berikut :



2.4 Hipotesis

Dalam penelitian ini, analisis menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Variabel independen DAU diduga mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah pada Tahun 2013-2017
2. Variabel independen DAK diduga mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah pada Tahun 2013-2017
3. Variabel independen Inflasi diduga mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah pada Tahun 2013-2017

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi

1. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang dapat digunakan untuk pembangunan di suatu daerah, dalam hal ini DAU yang berada di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017.
2. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN untuk mengalokasikan dananya kesuatu daerah,dalam hal ini DAK yang berada di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017.
3. Inflasi merupakan jumlah uang yang beredar di masyarakat,dalam hal ini inflasi yang berada di Kabupaten/Kota Jawa Tengah pada tahun 2013-2017.

3.2 Jenis dan Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini merupakan penelitaian kuantitatif dengan menggunakan data panel di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2013-2017. Dari data kuantitatif yaitu data yang digunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang dapat digunakan berupa data yang sudah diolah. Data sekunder yang digunakan yaitu data tempat atau ruang (*cross section*) yang diambil dari keseluruhan Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan data waktu (*time series*) yang diambil pada tahun 2013-2017. Data yang dikumpulkan dengan kurun waktu tertentu dari sampel. Data gabungan antara data *cross section* dan data *time series*, data yang digunakan dalam suatu penelitian disebut dengan data panel.

Data panel adalah data individual yang dapat diteliti selama rentang waktu tertentu sehingga data panel memberikan informasi observasi disetiap individu dalam sampel. Keuntungan dari data panel ini dapat meningkatkan jumlah suatu sampel

populasi dan memperbesar suatu *degree of freedom* dan dalam suatu penggabungan informasi yang akan dikaitkan dengan variabel *cross section* dan *time series*.

3.3 Metode Analisis

Dalam suatu penelitian ini dapat menggunakan analisis kuantitatif regresi dengan menggunakan metode data panel dan sebagai alat ukur dalam suatu pengolahan data yaitu dapat menggunakan program Eviews 9.

3.3.1 Model Regresi Data Panel

Pertumbuhan Ekonomi dalam sektor Pengeluaran_{it} = $\beta_0 + \beta_1 \text{DAU}_{it} + \beta_2 \text{DAK}_{it} + \beta_3 \text{Inflasi}_{it} + U_{it}$

Keterangan :

Y = Pertumbuhan Ekonomi dalam sektor pengeluaran

β_0 = Koefisien Intersep

i = Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

t = waktu (tahun 2013-2017)

U_{it} = variabel pengganggu

Ada tiga model pendekatan atau langkah-langkah untuk melakukan suatu regresi adalah sebagai berikut :

1. *Common Effect Models (CEM)* adalah pendekatan yang sangat sederhana yaitu CEM atau *pooled least square*, dimana model ini dapat di asumsikan intersep dari masing-masing koefisien yang sama. Adapula slope yang koefisien pada data *cross section* dan *time series*. Dari asumsi tersebut maka persamaan dalam Model CEM dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + U_{it}$$

2. *Fixed Effect Models (FEM)* adalah dalam suatu pendekatan ini dapat di perhatikan di unit cross section pada model regresi dalam bentuk data panel, yang dapat di peroleh pada setiap nilai intersep yang sangat berbea-beda di setiap unit cross section tetapi masih mengansumsikan pada slope koefisien yang tetap. Dengan menggunakan persamaan model FEM sebagai berikut :

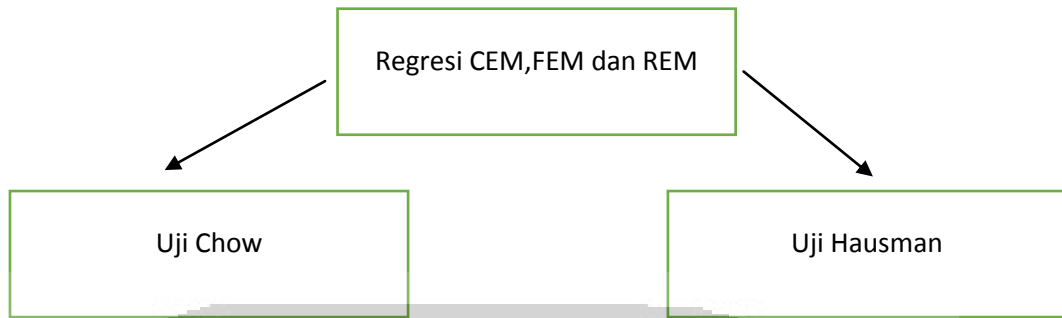
$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \sum_{j=1}^{n=25} a_j D_j + U_{it}$$

3. *Random Effect Models (REM)* adalah pada suatu model REM ini dapat diasumsikan pada α_i merupakan variabel yang random dengan mean α_0 , sehingga intersep dapat di asumsikan sebagai $\alpha_i = \alpha_0 + e_i$, dimana e_i merupakan error random yang mempunyai mean 0 dan varians e_i yang tidak secara langsung dapat di observasi. Dengan menggunakan varian model REM sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + U_{it}$$

Dalam menentukan suatu estimasi model regresi data panel dapat dilakukan dengan beberapa uji untuk memilih suatu metode pendekatan estimasi yang sesuai dan menghasilkan regresi yang baik. Pada langkah-langkah yang digunakan dapat memperoleh model yang tepat pada pertama melakukan suatu regresi dengan menggunakan metode model CEM dan FEM. Dengan melakukan test menggunakan uji Chow sehingga dapat melakukan hasil regresi yang baik pada dua model tersebut. Apabila menggunakan model FEM yang terbaik maka dapat melakukan suatu test kembali menggunakan uji Hausman dalam melakukan suatu model yang tepat adalah model FEM atau REM.

Gambar 3.1 Model Regresi



- a. Uji Chow dapat dilakukan pada saat memilih suatu model yang mana lebih baik di antara model *common effect* dan model *fixed effect* dengan menggunakan uji sebagai berikut : dalam melakukan uji ini dapat memilih suatu estimasi *common effect* atau *fixed effect* dengan melihat p-value apabila signifikansinya ($\leq 5\%$) maka dapat menggunakan model *fixed effect* sedangkan p-value yang tidak signifikansi ($\geq 5\%$) maka dapat menggunakan model *common effect*. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{(SSE_1 - SSE_2)/(n - 1)}{SSE_2/((nt - n - k))}$$

- b. Uji Langrange Multipler (LM) adalah suatu model yang dapat digunakan dengan model *common effect* yang tanpa menggunakan variabel dummy atau pada model *random effect* paling sering tepat dalam penggunaannya. Dalam metode *breusch Pagan* menggunakan uji signifikansi *random effect* pada dasarnya memiliki *residual* dari metode OLS :

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n (T e_i)^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^n e_{it}^2} - 1 \right]^2$$

- c. Uji Hausman dapat digunakan dalam model estimasi yang baik antarnya estimiasi *fixed effect* dan *random effect*. Dalam pengujian ini maka dapat melihat dari nilai p-value dan apabila p-value memiliki nilai signifikansi ($\leq 5\%$) maka model yang akan digunakan yaitu estimasi *fixed effect*. Sedangkan p-value yang tidak

signifikansi ($\geq 5\%$) maka model yang akan di gunakan yaitu estimasi random effect. Rumus yang digunakan adalah $m = \hat{q} \text{Var}(\hat{q}) - 1 \hat{q}$.

3.3.2 Uji Statistik

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen atau dapat diukur sejauh mana persentase regresi yang menerangkan tentang variasi variabel dependen. Dengan menggunakan rumus :

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = \frac{TSS - SSR}{TSS} = 1 - \frac{SSR}{TSS}$$

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Dalam variabel independen secara keseluruhan memiliki nilai signifikansi yang dapat memengaruhi variabel independen. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$F - \text{hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Dalam nilai F hitung lebih besar dari nilai F kritis maka variabel independen akan mempengaruhi nilai variabel dependen (Widarjono, 2013 : 65), menggunakan hipotesis :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

H_a : ada satu koefisien regresi tidak sama dengan nol.

Dengan cara membandingkan nilai prob f-stat dengan α ($0,05 = 5\%$), maka prob f-stat $< \alpha$ maka akan menolak H_0 dengan variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan nilai prob f-stat $> \alpha$ maka variabel independen tidak akan mempengaruhi variabel dependen.

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik)

Dalam pengujian variabel independen terhadap dependen secara individu dapat menggunakan hipotesis sebagai berikut :

a. Variabel Dana Alokasi Umum

$H_0 : \beta_1 = 0$ tidak ada pengaruh variabel DAU terhadap variabel PDRB

$H_a : \beta_1 > 0$ ada pengaruh positif variabel DAU terhadap variabel PDRB

b. Variabel Dana Alokasi Khusus

$H_0 : \beta_2 = 0$ tidak adanya pengaruh variabel Dana Alokasi Khusus terhadap variabel PDRB

$H_a : \beta_2 > 0$ ada pengaruh positif pada variabel Dana Alokasi Khusus terhadap variabel PDRB

c. Variabel Inflasi

$H_0 : \beta_4 = 0$ tidak ada pengaruh variabel Inflasi terhadap variabel PDRB

$H_a : \beta_4 < 0$ adanya pengaruh negatif terhadap variabel inflasi

Widarjono (2013), pada saat melakukan Uji T akan melakukan suatu perbandingan nilai prob t-stat dengan $\alpha = 1\%, 5\%$ dan 10% , apabila prob t-stat $< \alpha$ maka variabel independen yang secara individual tidak akan mempengaruhi suatu variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Skripsi ini akan meneliti faktor - faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2013-2017 dengan menggunakan model data panel. Jenis data dalam penelitian ini adalah data fixed effect model. Data yang digunakan adalah data Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Inflasi.

4.2 Hasil dan Pembahasan Analisis Data

4.2.1 Pemilihan Model Regresi

Untuk meregresi data panel dapat menggunakan tiga model yaitu *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*. Dalam memilih model yang akan digunakan maka harus melakukan pengujian terlebih dahulu yaitu dengan menggunakan uji chow dan uji hausman. Dalam hasil uji yang telah memilih model ini sebagai berikut :

1. Uji Chow

Dalam uji ini dapat memilih model mana yang lebih baik antara model *common effect* dengan model *fixed effect* menggunakan hipotesis sebagai berikut :

- a. H_0 : memilih menggunakan estimasi model *common effect*.
- b. H_a : memilih menggunakan estimasi model *fixed effect*

Dalam uji estimasi *common effect* atau estimasi *fixed effect* dapat melihat *p-value* apabila signifikansinya ($\leq 5\%$) maka model yang akan digunakan adalah *fixed effect*. Sedangkan apabila *p-value* yang tidak signifikansi ($\geq 5\%$) maka model yang akan digunakan adalah model *common effect*.

Tabel 4.1 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	df.	Prob.
Cross-section F	0.296019	(1,65)	0.5883
Cross-section Chi-square	0.318066	1	0.5728

Sumber : data diolah menggunakan Eviews 9

Nilai probabilitas *cross effect* dari perhitungan dapat menggunakan *Eviews 9* adalah sebesar $0.0000 < \alpha 5\%$ maka hasilnya menyatakan signifikansi, sehingga menolak H_0 dan gagal menolak H_a . Dengan hasil regresi tersebut maka model yang telah digunakan adalah estimasi model *fixed effect*.

2. Uji Hausman

Dalam pengujian ini menggunakan model estimasi yang terbaik antara model estimasi *fixed effect* dan *random effect*. Berikut adalah uji hipotesis sebagai berikut :

- a. H_0 : memilih menggunakan estimasi model *random effect*.
- b. H_a : memilih menggunakan estimasi model *fixed effect*.

Dalam uji Hausman dapat dilihat dari nilai *p-value* yang akan digunakan memiliki signifikansi ($\leq 5\%$) maka model yang akan digunakan adalah estimasi *fixed effect* sedangkan *p-value* yang tidak signifikansi ($\geq 5\%$) maka model yang akan digunakan adalah estimasi *random effect*.

Tabel 4.2 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Panel

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq.		
	Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.288326	4	0.0041

Sumber : data diolah menggunakan Eviews 9

Nilai dari probabilitas *cross section random* dari perhitungan dapat menggunakan *Eviews 9* adalah sebesar $0.0000 < \alpha 5\%$, sehingga menolak H_0 dan gagal menolak H_a , maka model yang dapat digunakan adalah estimasi model *fixed effect*.

- Estimasi *Fixed Effect* merupakan suatu pengestimasian untuk mengetahui perbedaan intersp antar variabel namun dengan intersep waktu yang sama. Dengan mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar variabel dan waktu.

Tabel 4.3 Hasil Fixed Effect

Cross-section fixed effects test equation:
 Dependent Variable: PDRB?
 Method: Panel Least Squares
 Date: 04/27/19 Time: 12:30
 Sample: 2013 2017
 Included observations: 50
 Cross-sections included: 2
 Total pool (unbalanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1261.047	1877.958	-0.671499	0.5042
DAU?	0.714074	0.091796	7.778898	0.0000
DAK?	-1.47E-08	7.12E-08	-0.206651	0.8369
INFLASI?	4.66E-08	2.27E-08	2.050623	0.0443

Sumber : data diolah menggunakan Eviews 9

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi dalam sektor Pengeluaran}_{it} = 0.714074 \text{ DAU}_{it} - 1.47\text{E-}08 \text{ DAK}_{it} + 4.66\text{E-}08 \text{ Inflasi}_{it} + U_{it}$$

4.3 Pengujian Hipotesis

4.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.4 Hasil Uji Determinasi

R-squared	0.989692	Mean dependent var	87109.87
Adjusted R-squared	0.989223	S.D. dependent var	121894.4
S.E. of regression	12653.87	Akaike info criterion	21.78476
Sum squared resid	1.06E+10	Schwarz criterion	21.91324
Log likelihood	-758.4666	Hannan-Quinn criter.	21.83579
F-statistic	2112.268	Durbin-Watson stat	0.000000
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : data diolah menggunakan Eviews 9

$R^2 = 0.989692$ yang artinya bahwa sebanyak 98.96% perubahan dari variabel Pertumbuhan Ekonomi dalam sektor Pengeluaran dapat di jelaskan oleh variasi dari variabel DAU, DAK dan Inflasi dalam model sedangkan sisanya 1.04% dapat dijelaskan pada sebab yang lainnya diluar model.

4.3.2 Hasil Uji F (Uji F)

Tabel 4.5 Hasil Uji F

R-squared	0.989692	Mean dependent var	87109.87
Adjusted R-squared	0.989223	S.D. dependent var	121894.4
S.E. of regression	12653.87	Akaike info criterion	21.78476
Sum squared resid	1.06E+10	Schwarz criterion	21.91324
Log likelihood	-758.4666	Hannan-Quinn criter.	21.83579
F-statistic	2112.268	Durbin-Watson stat	0.000000
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : data diolah menggunakan Eviews 9

Berdasarkan pengujian regresi data panel dalam penelitian ini menggunakan model *fixed effect* besarnya F-statistik yaitu 2112.268 dengan probabilitas sebesar $0.000000 < \alpha = 5\%$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen.

4.3.3 Hasil Uji Individu (Uji t)

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Coefficient	Prob.	Keterangan
Dana Alokasi Umum (DAU)	0.714074	0.0000	Signifikan
Dana Alokasi Khusus (DAK)	-1.47E-08	0.8369	TidakSignifikan
Inflasi	4.66E-08	0.0443	Signifikan

Sumber : data diolah

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan uji signifikansi DAU, menunjukkan probabilitas value sebesar $0.0000 < \alpha = 5\%$, maka menolak H_0 . Berarti secara statistic menunjukkan bahwa variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap variable pertumbuhan ekonomi dalam sector pengeluaran di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah. Koefisien DAU sebesar 0,714074 menunjukkan DAU mengalami kenaikan sebesar 1 juta rupiah maka Pertumbuhan Ekonomi dalam sektor Pengeluaran akan mengalami kenaikan sebesar 0,714074%.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan uji signifikansi DAK, menunjukkan probabilitas value sebesar $0.8369 > \alpha = 5\%$, maka gagal menolak H_0 . Berarti secara statistik menunjukkan bahwa variabel DAK tidak berpengaruh terhadap variable pertumbuhan ekonomi dalam sector pengeluaran di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah. Koefisien DAK sebesar $-1.47E-08$ menunjukkan DAK mengalami kenaikan sebesar 1 juta rupiah maka tidak mempengaruhi perubahan Pertumbuhan Ekonomi dalam sektor Pengeluaran. Hal ini disebabkan karena dana dialokasikan kegiatan-kegiatan yang tidak meningkatkan produksi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

3. Inflasi

Berdasarkan uji signifikansi Inflasi, menunjukkan probabilitas value sebesar $0.0443 < \alpha = 5\%$, maka menolak H_0 . Berarti secara statistic menunjukkan bahwa variable Inflasi berpengaruh signifikan terhadap variable pertumbuhan ekonomi dalam sector pengeluaran di Provinsi Jawa Tengah. Koefisien Inflasi sebesar $4.66E-08$ menunjukkan Inflasi mengalami kenaikan sebesar 1% maka Pertumbuhan Ekonomi dalam sektor Pengeluaran akan mengalami kenaikan sebesar $4.66E-08\%$. Inflasi itu sendiri berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang artinya ketika inflasi itu meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan tetap tinggi. Bahwa hasil regresi berpengaruh positif sedangkan hasil hepotesis berpengaruh negatif. Hal ini disebabkan kenaikan inflasi mempengaruhi motivasi produsen untuk meningkatkan produksi untuk pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah sangat signifikan pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak signifikan. Inflasi itu sendiri berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang artinya ketika inflasi itu meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan tetap tinggi. Pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Tengah memiliki kekayaan alam terbesar adalah alam pertanian, perikanan dan lain sebagainya. Dengan bentangan luas sawah tak sebanding luas dengan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam tujuan tersebut dapat mengurangi kemiskinan serta menghilangkan kesenjangan dengan membangun pabrik yang dapat memberikan dampak signifikan untuk menghadapi kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah yaitu dalam kisaran pengeluaran sebesar 4-6 persen. Pada Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017. Pertumbuhan ekonomi yang tertinggi pada tahun 2015 sebesar 5,96% dan pertumbuhan ekonomi yang paling rendah pada tahun 2014 sebesar 4,07%. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Tapi pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah lebih tinggi pada tingkat Provinsi Jawa Tengah ataupun Nasional.

5.2 Implikasi

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya untuk memfokuskan pada satu Provinsi Jawa Tengah Untuk penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian dengan populasi dan sampel se Jawa Tengah.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia. (2009). Permintaan dan Penawaran. Diambil 10 Januari 2019 dari <https://www.bi.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. (2018). Inflasi Provinsi Jawa Tengah 2013-2017. Diambil 18 Januari 2019 dari <https://jateng.bps.go.id/>
- _____. (2013). Statistik Keuangan Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2013. Diambil 12 April 2019 dari <https://jateng.bps.go.id/>
- _____. (2014). Statistik Keuangan Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2014. Diambil 12 April 2019 dari <https://jateng.bps.go.id/>
- _____. (2015). Statistik Keuangan Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2015. Diambil 12 April 2019 dari <https://jateng.bps.go.id/>
- _____. (2016). Statistik Keuangan Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2016. Diambil 12 April 2019 dari <https://jateng.bps.go.id/>
- _____. (2017). Statistik Keuangan Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2017. Diambil 12 April 2019, dari <https://jateng.bps.go.id/>
- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah 2013-2017. Diambil 12 November 2018 dari <https://jateng.bps.go.id/>
- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Banjarnegara 2013-2017. Diambil 10 Agustus 2018 dari <https://banjarnegarakab.bps.go.id/>
- _____. (2017). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Banyumas 2013-2017. Diambil 12 November 2018 dari <https://banyumaskab.bps.go.id/>
- _____. (2017). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Batang 2013-2017. Diambil 12 November 2018 dari <https://batangkab.bps.go.id/>
- _____. (2017). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Blora 2013-2017. Diambil 12 November 2018 dari <https://blorakab.bps.go.id/>
- _____. (2019). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Boyolali 2013-2017. Diambil 26 Januari 2019 dari <https://boyolalikab.bps.go.id/>
- _____. (2019). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Brebes 2013-2017. Diambil 12 November 2018 dari <https://brebeskab.bps.go.id/>
- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Cilacap 2013-2017. Diambil 12 November 2018 dari <https://cilacapkab.bps.go.id/>
- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Demak 2013-2017. Diambil 12 November 2018 dari <https://demakkab.bps.go.id/>

- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Grobogan 2013-2017. Diambil 12 November 2018 dari <https://grobogankab.bps.go.id/>
- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Jepara 2013-2017. Diambil 12 November 2018 dari <https://jeparakab.bps.go.id/>
- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Karanganyar 2013-2017. Diambil 12 November 2018 dari <https://karanganyarkab.bps.go.id/>
- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Kebumen 2013-2017. Diambil 15 November 2018 dari <https://kebumenkab.bps.go.id/>
- _____. (2017). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Kendal 2013-2017. Diambil 23 November 2018 dari <https://kendalkab.bps.go.id/>
- _____. (2019). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Klaten 2013-2017. Diambil 23 November 2018 dari <https://klatenkab.bps.go.id/>
- _____. (2017). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Kudus 2013-2017. Diambil 29 Oktober 2018 dari <https://kuduskab.bps.go.id/>
- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Magelang 2013-2017. Diambil 25 November 2018 dari <https://magelangkab.bps.go.id/>
- _____. (2017). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Pati 2013-2017. Diambil 25 November 2018 dari <https://patikab.bps.go.id/>
- _____. (2017). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Pekalongan 2013-2017. Diambil 25 November 2018 dari <https://pekalongankab.bps.go.id/>
- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Pemalang 2013-2017. Diambil 25 November 2018 dari <https://pemalangkab.bps.go.id/>
- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Purbalingga 2013-2017. Diambil 25 November 2018 dari <https://purbalinggakab.bps.go.id/>
- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Purworejo 2013-2017. Diambil 25 November 2018 dari <https://purworejokab.bps.go.id/>
- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Rembang 2013-2017. Diambil 15 Desember 2018 dari <https://rembangkab.bps.go.id/>
- _____. (2017). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Semarang 2013-2017. Diambil 15 Desember 2018 dari <https://semarangkab.bps.go.id/>
- _____. (2017). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Sragen 2013-2017. Diambil 15 Desember 2018 dari <https://sragenkab.bps.go.id/>
- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Sukoharjo 2013-2017. Diambil 15 Desember 2018 dari <https://sukoharjokab.bps.go.id/>

- _____. (2017). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Tegal 2013-2017. Diambil 15 Desember 2018 dari <https://tegalkab.bps.go.id/>
- _____. (2017). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Temanggung 2013-2017. Diambil 19 Desember 2018 dari <https://temanggungkab.bps.go.id/>
- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Wonogiri 2013-2017. Diambil 19 Desember 2018 dari <https://wonogirikab.bps.go.id/>
- _____. (2017). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Wonosobo 2013-2017. Diambil 19 Desember 2018 dari <https://wonosobokab.bps.go.id/>
- _____. (2017). PDRB Dalam Pengeluaran Kota Magelang 2013-2017. Diambil 24 Desember 2018 dari <https://magelangkota.bps.go.id/>
- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kota Pekalongan 2013-2017. Diambil 24 Desember 2018 dari <https://pekalongankota.bps.go.id/>
- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kota Salatiga 2013-2017. Diambil 30 Desember 2018 dari <https://salatigakota.bps.go.id/>
- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kota Semarang 2013-2017. Diambil 30 Desember 2018 dari <https://semarangkota.bps.go.id/>
- _____. (2017). PDRB Dalam Pengeluaran Kota Surakarta 2013-2017. Diambil 30 Desember 2018 dari <https://surakartakota.bps.go.id/>
- _____. (2017). PDRB Dalam Pengeluaran Kota Tegal 2013-2017. Diambil 30 Desember 2018 dari <https://tegalkota.bps.go.id/>
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan. (2016). Dana Alokasi Umum 2013-2017. Diambil 04 Januari 2019 dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/danaalokasiumum>
- _____. (2016). Dana Alokasi Khusus 2013-2017. Diambil 04 Januari 2019 dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/danaalokasiumum>
- Luh Putu Rani Mayasari Ni Kadek Sinarwati(2012). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng”. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Denpasar Bali
- Setiyawati (2013). “Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran : Pendekatan Analisis Jalur”. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang. Semarang.
- Wasingah (2018). “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015”. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.

Wibowo (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 1984 – 2009”). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang. Semarang.

Widarjono, A. (2007). Ekonometrika Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis. Edisi Kedua. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UII.

Todaro, Michael P. (2000). Pembangunan Ekonomi. Jakarta : PT. Bumi Aksara





Lampiran I

Data Penelitian

Kabupaten/Kota	Tahun	Pengeluaran	DAU	DAK	Inflasi
Kab Banjarnegara	2013	5.44	763426566	6948263	8.35
Kab Banjarnegara	2014	5.31	826044419	6106604	7.78
Kab Banjarnegara	2015	5.47	862810552	6373118	2.97
Kab Banjarnegara	2016	5.41	9,76643E+11	2,52047E+11	2.87
Kab Banjarnegara	2017	5.42	1,02969E+12	3,69248E+11	3.67
Kab Banyumas	2013	6.97	1127939	7866273	8.5
Kab Banyumas	2014	5.67	1224710992	8251914	7.09
Kab Banyumas	2015	6.12	1277833798	7054714	2.52
Kab Banyumas	2016	6.05	1,39854E+12	4,12854E+11	2.42
Kab Banyumas	2017	6.34	1,52515E+12	4,69885E+11	3.91
Kab Batang	2013	5.88	64166363	4979244	8.08
Kab Batang	2014	5.31	682182894	521766	7.66
Kab Batang	2015	5.42	706782246	6643245	2.94
Kab Batang	2016	4.93	7,90848E+11	2,03973E+11	2.24
Kab Batang	2017	5.29	7,90848E+11	2,02042E+11	3.44
Kab Blora	2013	6.14	753830036	5349289	7.94
Kab Blora	2014	5.24	823874089	6114066	7.13
Kab Blora	2015	4.64	848823612	7648156	2.85
Kab Blora	2016	5.93	9,43325E+11	2,77435E+11	2.14
Kab Blora	2017	5.84	9,43325E+11	3,20192E+11	2.98
Kab Boyolali	2013	5.83	871685981	592335	8.21
Kab Boyolali	2014	5.42	943220456	8109572	7.45
Kab Boyolali	2015	5.91	968089632	6832272	2.58
Kab Boyolali	2016	5.27	1,03274E+12	2,79575E+11	2.65
Kab Boyolali	2017	5.52	1,03274E+12	3,21761E+11	3.08
Kab Brebes	2013	5.91	109899951	826289	9.83
Kab Brebes	2014	5.30	1186969845	9797531	6.2
Kab Brebes	2015	5.98	1234338079	8108082	3.08
Kab Brebes	2016	4.87	1,33938E+12	3,61801E+11	2.84
Kab Brebes	2017	5.47	1,33938E+12	4,06374E+11	4.24
Kab Cilacap	2013	1.66	119731506	10815735	8.37
Kab Cilacap	2014	2.92	1291121704	11020396	8.19
Kab Cilacap	2015	5.96	1332536848	884337	2.63
Kab Cilacap	2016	5.06	1,3847E+12	4,83813E+11	2.77
Kab Cilacap	2017	2.45	1,51005E+12	4,45586E+11	4.41
Kab Demak	2013	5.27	737911647	7655619	8.22
Kab Demak	2014	4.29	795874748	7459967	8.69
Kab Demak	2015	5.93	833041455	7686363	2.8

Kab Demak	2016	5.03	9,08644E+11	3,06941E+11	2.27
Kab Demak	2017	5.56	9,58001E+11	2,74313E+11	3.57
Kab Grobogan	2013	4.57	906666365	10430444	7.88
Kab Grobogan	2014	4.07	977675512	8583869	8.03
Kab Grobogan	2015	5.96	10089015	7609945	3.31
Kab Grobogan	2016	4.46	1,11034E+12	1,53405E+11	2.41
Kab Grobogan	2017	5.65	1,11034E+12	3,84278E+11	4.05
Kab Jepara	2013	5.39	814380324	6748737	7.95
Kab Jepara	2014	4.81	887768694	8129411	9.87
Kab Jepara	2015	5.04	93577112	7425861	4.57
Kab Jepara	2016	5.02	1,00037E+12	3,3931E+11	3.45
Kab Jepara	2017	5.13	1,00037E+12	3,19116E+11	2.83
Kab Karangayar	2013	5.69	810216582	5520306	8.7
Kab Karangayar	2014	5.22	870001752	5723871	7.38
Kab Karangayar	2015	5.05	906446527	5799317	2.4
Kab Karangayar	2016	5.37	9,96164E+11	3,52753E+11	1.93
Kab Karangayar	2017	5.52	9,96164E+11	3,47562E+11	3.15
Kab Kebumen	2013	4.57	102187118	7906386	10.46
Kab Kebumen	2014	5.79	1125568884	8070917	7.36
Kab Kebumen	2015	6.28	1146008708	6901197	2.91
Kab Kebumen	2016	4.97	9,72953E+11	4,80416E+11	2.71
Kab Kebumen	2017	4.89	1,25607E+12	4,36397E+11	3.25
Kab Kendal	2013	6.22	788134078	5939369	6.9
Kab Kendal	2014	5.17	852170849	6384882	8.34
Kab Kendal	2015	5.17	884901572	6190042	4.13
Kab Kendal	2016	5.65	9,72953E+11	2,28132E+11	2.47
Kab Kendal	2017	5.57	1,0258E+12	2,81495E+11	3.6
Kab Klaten	2013	5.96	1066318427	6117542	7.92
Kab Klaten	2014	5.84	1142586588	6657642	7.76
Kab Klaten	2015	5.30	1164196398	5426397	2.57
Kab Klaten	2016	5.14	1,20434E+12	3,18995E+11	2.31
Kab Klaten	2017	5.07	1,30521E+12	3,77519E+11	3.12
Kab Kudus	2013	4.36	719406935	5220888	8.31
Kab Kudus	2014	4.43	795851851	551889	8.59
Kab Kudus	2015	3.90	784919177	784919177	3.28
Kab Kudus	2016	2.53	8,22154E+11	2,28303E+11	2.32
Kab Kudus	2017	2.97	8,22154E+11	2,35573E+11	4.17
Kab Magelang	2013	5.91	899528369	7007087	8.34
Kab Magelang	2014	5.38	965124427	6498149	7.91
Kab Magelang	2015	5.18	996070014	4223523	3.6
Kab Magelang	2016	5.37	1,07898E+12	83510170410	2.86
Kab Magelang	2017	5.06	1,07898E+12	3,24759E+11	3.47
Kab Pati	2013	5.97	960479326	7290337	7.57
Kab Pati	2014	4.64	1043498355	7985263	8.01

Kab Pati	2015	5.94	1086645667	5413072	3.23
Kab Pati	2016	5.20	1,20751E+12	3,27576E+11	2.31
Kab Pati	2017	5.40	1,20751E+12	4,362E+11	3.51
Kab Pekalongan	2013	5.99	768500117	6058759	8.18
Kab Pekalongan	2014	4.95	831579	6038095	8.32
Kab Pekalongan	2015	4.78	862011706	6682523	3.42
Kab Pekalongan	2016	5.16	9,26571E+11	2,22507E+11	2.96
Kab Pekalongan	2017	5.28	9,26571E+11	3,34863E+11	4.01
Kab Pemalang	2013	5.57	931426998	7140225	6.52
Kab Pemalang	2014	5.52	1016813333	7202474	7.38
Kab Pemalang	2015	5.58	105898253	7645581	3.52
Kab Pemalang	2016	5.38	1,19792E+12	2,70427E+11	2.33
Kab Pemalang	2017	5.39	1,28468E+12	2,7138E+11	3.64
Kab Purbalingga	2013	5.27	71918502	6664106	9.57
Kab Purbalingga	2014	5.27	777989499	5726733	9.08
Kab Purbalingga	2015	5.47	805222229	6052411	1.62
Kab Purbalingga	2016	4.78	8,97338E+11	2,42376E+11	2.39
Kab Purbalingga	2017	5.12	9,46081E+11	2,96309E+11	3.72
Kab Purworejo	2013	4.94	793904679	5332302	7.14
Kab Purworejo	2014	4.48	854737495	5702465	8.48
Kab Purworejo	2015	5.33	875528049	6900789	3.45
Kab Purworejo	2016	5.12	9,40778E+11	3,39418E+11	2.66
Kab Purworejo	2017	5.14	1,00891E+12	2,66743E+11	4.29
Kab Rembang	2013	5.43	64027336	5677147	6.88
Kab Rembang	2014	5.15	700774721	61608	7.59
Kab Rembang	2015	5.50	723091447	6862664	2.66
Kab Rembang	2016	5.23	7,85381E+11	1,07559E+11	1.75
Kab Rembang	2017	6.18	8,82034E+11	1,95354E+11	3.31
Kab Semarang	2013	5.97	77860492	5911347	8.11
Kab Semarang	2014	5.85	84873601	6740734	8.63
Kab Semarang	2015	5.52	876672925	2401948	2.85
Kab Semarang	2016	5.27	9,68848E+11	3,1078E+11	2.39
Kab Semarang	2017	5.47	9,68848E+11	3,03081E+11	3.67
Kab Sragen	2013	6.70	869155545	6185756	7.55
Kab Sragen	2014	5.59	946826641	764693	8.51
Kab Sragen	2015	6.05	977443589	725217	3.05
Kab Sragen	2016	5.72	1,06777E+12	3,33936E+11	2.49
Kab Sragen	2017	5.81	1,06777E+12	3,22608E+11	3.18
Kab Sukoharjo	2013	5.78	7634629	5312468	8.42
Kab Sukoharjo	2014	5.40	826891481	5690448	7.93
Kab Sukoharjo	2015	5.69	854457636	5387113	2.69
Kab Sukoharjo	2016	5.71	9,5991E+11	2,87045E+11	2.34
Kab Sukoharjo	2017	5.72	1,02816E+12	2,93705E+11	3.4
Kab Tegal	2013	6.73	957576304	7252491	7.79

Kab Tegal	2014	5.03	104421131	8486243	8.48
Kab Tegal	2015	5.45	1085549293	5030537	3.64
Kab Tegal	2016	6.37	1,1621E+13	2,90589E+11	2.67
Kab Tegal	2017	5.38	1,22523E+12	3,6072E+11	3.58
Kab Temanggung	2013	5.20	651171674	4665824	7.01
Kab Temanggung	2014	5.03	6816575	47116142	7.81
Kab Temanggung	2015	5.21	731733741	6138976	2.74
Kab Temanggung	2016	5.00	8,07995E+11	1,9901E+11	2.42
Kab Temanggung	2017	4.68	8,07995E+11	2,2813E+11	3.12
Kab Wonogiri	2013	4.78	917476557	7570589	8.6
Kab Wonogiri	2014	5.26	1001378439	5939212	7.2
Kab Wonogiri	2015	5.40	1031393472	8315297	2.13
Kab Wonogiri	2016	5.22	1,14543E+12	2,89121E+11	2.94
Kab Wonogiri	2017	5.17	1,14543E+12	3,7387E+11	2.32
Kab Wonosobo	2013	4.94	665548034	57950	8.82
Kab Wonosobo	2014	4.48	724245009	5942301	8.44
Kab Wonosobo	2015	5.33	748447761	706761	2.71
Kab Wonosobo	2016	5.14	8,41407E+11	1,98974E+11	2.97
Kab Wonosobo	2017	3.16	8,41407E+11	2,61082E+11	3.21
Kota Magelang	2013	3.34	385859241	2279356	7.79
Kota Magelang	2014	5.31	417211449	3420987	7.92
Kota Magelang	2015	5.37	418257922	3221698	2.7
Kota Magelang	2016	4.04	4,4791E+11	89394073463	2.25
Kota Magelang	2017	5.18	4,4791E+11	1,03119E+11	3.9
Kota Pekalongan	2013	5.91	384489368	3854965	7.4
Kota Pekalongan	2014	5.48	412871094	3417371	7.82
Kota Pekalongan	2015	5.00	421276527	3933505	3.46
Kota Pekalongan	2016	5.36	4,57085E+11	1,09413E+11	2.94
Kota Pekalongan	2017	5.32	4,57085E+11	1,04827E+11	3.61
Kota Salatiga	2013	6.30	358331867	2839841	7.67
Kota Salatiga	2014	5.57	399083343	3205705	7.84
Kota Salatiga	2015	5.17	400176755	424754	2.61
Kota Salatiga	2016	5.23	4,5608E+11	83698193202	2.19
Kota Salatiga	2017	5.21	4,80853E+11	1,15279E+11	3.5
Kota Semarang	2013	6.25	1054002569	4997674	8.19
Kota Semarang	2014	6.38	1104739473	3898262	8.53
Kota Semarang	2015	5.79	1126847634	2490443	2.56
Kota Semarang	2016	5.64	1,21171E+12	2,46887E+11	2.32
Kota Semarang	2017	5.64	1,37626E+12	3,11019E+11	3.64
Kota Surakarta	2013	6.25	659647382	3791473	8.32
Kota Surakarta	2014	5.28	710803934	4384811	8.01
Kota Surakarta	2015	5.44	713300856	37501	2.56
Kota Surakarta	2016	5.32	8,41536E+11	1,96724E+11	2.15
Kota Surakarta	2017	5.33	8,41536E+11	1,86708E+11	3.1

Kota Tegal	2013	5.67	370642983	3353091	5.8
Kota Tegal	2014	5.04	390732536	3057835	7.4
Kota Tegal	2015	5.45	405831088	3922109	3.95
Kota Tegal	2016	5.46	4,90772E+11	1,65828E+11	2.71
Kota Tegal	2017	5.46	4,90772E+11	1,6914E+11	4.03

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

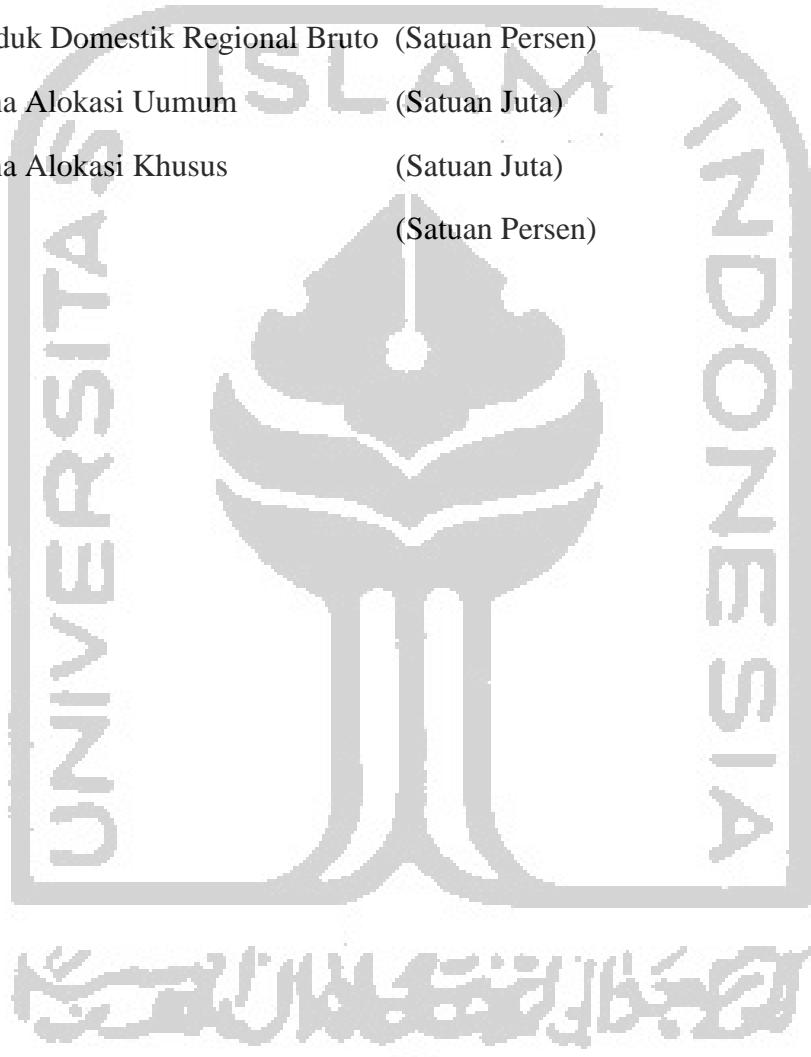
Keterangan :

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto (Satuan Persen)

DAU : Dana Alokasi Umum (Satuan Juta)

DAK : Dana Alokasi Khusus (Satuan Juta)

Inflasi (Satuan Persen)



Lampiran II

Hasil Fixed Effect

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: PDRB dalam Pengeluaran
Method: Panel Least Squares
Date: 04/27/19 Time: 12:30
Sample: 2013 2017
Included observations: 50
Cross-sections included: 2
Total pool (unbalanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1261.047	1877.958	-0.671499	0.5042
DAU	0.714074	0.091796	7.778898	0.0000
DAK	-1.47E-08	7.12E-08	-0.206651	0.8369
INFLASI	4.66E-08	2.27E-08	2.050623	0.0443

R-squared	0.989692	Mean dependent var	87109.87
Adjusted R-squared	0.989223	S.D. dependent var	121894.4
S.E. of regression	12653.87	Akaike info criterion	21.78476
Sum squared resid	1.06E+10	Schwarz criterion	21.91324
Log likelihood	-758.4666	Hannan-Quinn criter.	21.83579
F-statistic	2112.268	Durbin-Watson stat	0.000000
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data yang telah diolah dengan Eviews 9

Lampiran III

UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	df.	Prob.
Cross-section F	0.296019	(1,65)	0.5883
Cross-section Chi-square	0.318066	1	0.5728

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: PDRB?

Method: Panel Least Squares

Date: 04/27/19 Time: 12:30

Sample: 2013 2017

Included observations: 50

Cross-sections included: 2

Total pool (unbalanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1261.047	1877.958	-0.671499	0.5042
DAU?	0.714074	0.091796	7.778898	0.0000
DAK?	-1.47E-08	7.12E-08	-0.206651	0.8369
INFLASI?	4.66E-08	2.27E-08	2.050623	0.0443
R-squared	0.989692	Mean dependent var	87109.87	
Adjusted R-squared	0.989223	S.D. dependent var	121894.4	
S.E. of regression	12653.87	Akaike info criterion	21.78476	
Sum squared resid	1.06E+10	Schwarz criterion	21.91324	
Log likelihood	-758.4666	Hannan-Quinn criter.	21.83579	
F-statistic	2112.268	Durbin-Watson stat	0.000000	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Data yang telah diolah dengan Eviews 9